

LEMBAR HASIL PENILAIAN  
SEJAWAT SEBIDANG atau PEER REVIEW

**KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH**

Judul Karya Ilmiah (Artikel) : Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan pada Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana

Jumlah Penulis : 1 Orang

Nama-nama Penulis : Sahuri Lasmadi

Status Penulis : Penulis ke 1

Identitas Jurnal Ilmiah : a. Nama jurnal : INOVATIF  
 b. Nomor ISSN : ISSN: 19107-6681  
 c. Vol., No., Bulan, Tahun : Vol.II, No.III, Januari 2010  
 d. Penerbit : Program Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum Unja  
 e. DOI Artikel (jika ada) :  
 f. Alamat Web Jurnal : <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/issue/view/87>  
<https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/200>  
 g. Terindeks di :

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah :  Jurnal Ilmiah Internasional / Internasional Bereputasi \*\*) (beri tanda  $\surd$  yang dipilih)  
 Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi  
 Jurnal Ilmiah Nasional / Nasional terindeks (\*\*\*)

HASIL PENILAIAN Peer Review :

No	Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal JURNAL ILMIAH			Nilai Akhir Yang Diperoleh *)
		Internasional / Bereputasi <input type="checkbox"/>	Nasional Terakreditasi <input type="checkbox"/>	Nasional (***) <input type="checkbox"/>	
1	Kelengkapan unsur isi karya (10%)			1	1
2	Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)			3	3
3	Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)			3	2
4	Kelengkapan unsur dan kualitas penerbitan (30%)			3	3
<b>Total</b>				<b>10</b>	<b>9</b>
Kontribusi Pengusul Penulis ke 1 100% x Nilai Akhir yang diperoleh = 9 x 1 = 10					

Catatan Penilaian ARTIKEL oleh Reviewer/Komentar Peer Review:

1. Tulisan dalam artikel yang diusulkan ini merupakan jurnal yang tidak terakredasi namun mempunyai ISSN: 19107-6681 dan memenuhi kelengkapan unsur-unsur sebagai artikel dalam Jurnal Ilmiah. Karena dalam artikel membahas Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan pada Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana dengan Pokok pembahasan Kewenangan masing-masing sub sistem dalam sistem peradilan pidana sangat menentukan sekali dalam rangka penegakan hukum terutama pada tindak pidana korupsi, agar kepastian hukum dan kesebandingan hukum dapat tercapai.
2. Ruang lingkup & kedalaman pembahasan Tulisan dalam Artikel ini masuk dalam ruang lingkup jurnal ilmiah mengingat dalam jurnal ini ada ide pengembangan hukum tentang perlu kepastian hukum tentang kewenangan masing-masing subsistem-subsistem dalam system peradilan pidana terutama dalam penyidikan pada tindak pidana korupsi. Jika keterpaduan kewenangan masing-masing subsistem-subsistem dalam sistem peradilan pidana tidak terwujud, masyarakat dapat beranggapan bahwa sistem

peradilan pidana menyebabkan timbulnya kejahatan apalagi tindak pidana korupsi.

3. Kecukupan dan kemutakhiran dalam Penelitian cukup memadai karena metode yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan dalam upaya penanggulangan kejahatan, sinkronisasi (keterpaduan) antara penegak hukum memang merupakan suatu hal yang sangat penting bahkan ketiadaan sinkronisasi/keterpaduan merupakan salah satu faktor penyebab gagalnya pemberantasan kejahatan. Hubungan yang terpadu antara polisi, jaksa dan hakim dalam sistem peradilan pidana merupakan hal yang sangat penting artinya yaitu dalam penyelesaian perkara pidana pada tahap pra-ajudikasi.
4. Tulisan dalam artikel ini ada hal baru yang ditawarkan, bahwa perlu adanya sinkronisasi pelaksanaan penegakan hukum dikalangan subsistem-subsistem. Jika keterpaduan subsistem-subsistem dalam sistem peradilan pidana tidak terwujud, masyarakat dapat beranggapan bahwa sistem peradilan pidana menyebabkan timbulnya kejahatan.
5. Tulisan dalam artikel ini tidak terindikasi plagiasi karena diterbitkan Program Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum UNJA dengan nama Jurnal; *INOVATIF* yang memiliki ISSN: 19107-6681, <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/issue/view/87>.
6. Kesesuaian bidang ilmu: Tulisan dalam artikel yang diterbitkan selaras dengan bidang ilmu hukum yang penulis tekuni, terutama hukum pidana, sebagai dosen Fakultas Hukum UNJA, yang memiliki latar belakang Dr. Ilmu Hukum di Bidang Hukum Pidana dari Program Doktor Universitas Airlangga Surabaya.

Jambi, 4 Juni 2021  
REVIEWER : *X / 2 \*\**)

Nama: **Prof. Dr. Bahder Johan Nasution, S.H., M.Hum.**  
NIP: **195703111989071002**  
Jabatan Fungsional: **Guru Besar**  
Unit Kerja: **FH Universitas Jambi**

LEMBAR HASIL PENILAIAN  
SEJAWAT SEBIDANG atau PEER REVIEW

**KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH**

Judul Karya Ilmiah (Artikel) : Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan pada Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana

Jumlah Penulis : 1 Orang

Nama-nama Penulis : Sahuri Lasmadi

Status Penulis : Penulis ke 1

Identitas Jurnal Ilmiah : a. Nama jurnal : INOVATIF  
 b. Nomor ISSN : ISSN: 19107-6681  
 c. Vol., No., Bulan, Tahun : Vol.II, No.III, Januari 2010  
 d. Penerbit : Program Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum Unja  
 e. DOI Artikel (jika ada) :  
 f. Alamat Web Jurnal : <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/issue/view/87>  
<https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/200>  
 g. Terindeks di :

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah :  Jurnal Ilmiah Internasional / Internasional Bereputasi \*\*) (beri tanda  $\surd$  yang dipilih)  Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi  Jurnal Ilmiah Nasional / Nasional terindeks \*\*\*)

HASIL PENILAIAN Peer Review :

No	Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal JURNAL ILMIAH			Nilai Akhir Yang Diperoleh *)
		Internasional / Bereputasi <input type="checkbox"/>	Nasional Terakreditasi <input type="checkbox"/>	Nasional ***) <input type="checkbox"/>	
1	Kelengkapan unsur isi karya (10%)			1	1
2	Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)			3	2,5
3	Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)			3	2,5
4	Kelengkapan unsur dan kualitas penerbitan (30%)			3	3
<b>Total</b>				<b>10</b>	<b>9</b>
Kontribusi Pengusul Penulis ke 1 100% x Nilai Akhir yang diperoleh = 9 x 1 = 9					

Catatan Penilaian ARTIKEL oleh Reviewer/Komentar Peer Review:

1. Artikel yang diusulkan ini merupakan jurnal yang tidak terakreditasi namun mempunyai ISSN: 19107-6681 dan memenuhi kelengkapan unsur-unsur sebagai artikel dalam Jurnal Ilmiah. Karena dalam artikel membahas Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan pada Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana dengan Pokok pembahasan Kewenangan masing-masing sub sistem dalam sistem peradilan pidana sangat menentukan sekali dalam rangka penegakan hukum terutama pada tindak pidana korupsi, agar kepastian hukum dan kesebandingan hukum dapat tercapai.
2. Ruang lingkup & kedalaman pembahasan dalam Artikel ini masuk dalam ruang lingkup jurnal ilmiah mengingat dalam jurnal ini ada ide pengembangan hukum tentang perlu kepastian hukum tentang kewenangan masing-masing subsistem-subsistem dalam system peradilan pidana terutama dalam penyidikan pada tindak pidana korupsi. Jika keterpaduan kewenangan masing-masing subsistem-subsistem dalam sistem peradilan pidana tidak terwujud, masyarakat dapat beranggapan bahwa sistem

peradilan pidana menyebabkan timbulnya kejahatan apalagi tindak pidana korupsi.

3. Kecukupan dan kemutakhiran dalam Penelitian cukup memadai karena metode yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan dalam upaya penanggulangan kejahatan, sinkronisasi (keterpaduan) antara penegak hukum memang merupakan suatu hal yang sangat penting bahkan ketiadaan sinkronisasi/keterpaduan merupakan salah satu faktor penyebab gagalnya pemberantasan kejahatan. Hubungan yang terpadu antara polisi, jaksa dan hakim dalam sistem peradilan pidana merupakan hal yang sangat penting artinya yaitu dalam penyelesaian perkara pidana pada tahap pra-ajudikasi.
4. Dalam artikel ini ada hal baru yang ditawarkan, bahwa perlu adanya sinkronisasi pelaksanaan penegakan hukum dikalangan subsistem-subsistem. Jika keterpaduan subsistem-subsistem dalam sistem peradilan pidana tidak terwujud, masyarakat dapat beranggapan bahwa sistem peradilan pidana menyebabkan timbulnya kejahatan.
5. Artikel ini tidak terindikasi plagiasi karena diterbitkan Program Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum UNJA dengan nama Jurnal; *INOVATIF* yang memiliki ISSN: 19107-6681, <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/issue/view/87>.
6. Kesesuaian bidang ilmu: Artikel yang diterbitkan selaras dengan bidang ilmu hukum yang penulis tekuni, terutama hukum pidana, sebagai dosen Fakultas Hukum UNJA, yang memiliki latar belakang Dr. Ilmu Hukum di Bidang Hukum Pidana dari Program Doktor Universitas Airlangga Surabaya.

Jambi, 3 Juni 2021

REVIEWER : 1 / 2 (\*\*)



Nama: **Prof. Dr. Sukamto Satoto, S.H., M.H.**

NIP: **195503231984031001**

Jabatan Fungsional: **Guru Besar**

Unit Kerja: **FH Universitas Jambi**